



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 31/M.PPN/HK/05/2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini merupakan proyek-proyek dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha.
- KETIGA : Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini digunakan sebagai rujukan dan/atau bahan pertimbangan Pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, dan pemberian persetujuan Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).
- KEEMPAT : Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2024 terdiri atas:

- a. Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Proses Penyiapan; dan
 - b. Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Siap Ditawarkan.
- KELIMA : Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Proses Penyiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf a adalah Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang sedang dalam tahap perencanaan atau tahap penyiapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023.
- KEENAM : Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Siap Ditawarkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf b adalah Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam tahap penyiapan yang telah memenuhi persyaratan untuk tahap transaksi dan ditawarkan kepada badan usaha atau proyek dalam tahap transaksi untuk ditawarkan kepada lembaga jasa keuangan.
- KETUJUH : Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama atas Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang tercantum dalam Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha ini melanjutkan tahapan pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 serta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk koordinasi kelancaran pelaksanaan tahapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dengan melibatkan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait.


KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

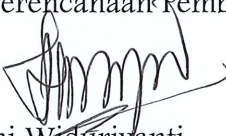
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 


Teni Widuriyanti

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 31/M.PPN/HK/05/2024
TANGGAL 8 MEI 2024

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2024

PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PROSES PENYIAPAN

Nomor	Nama Proyek	Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
Konektivitas Udara		
1	Bandar Udara Bintan	Menteri Perhubungan
Konektivitas Laut		
2	Pelabuhan Baubau	Menteri Perhubungan
Konektivitas Kereta Api		
3	Kereta Api Prabumulih-Tarahan	Menteri Perhubungan
4	Perkeretaapian Perkotaan Metropolitan Bandung	Gubernur Jawa Barat
Konektivitas Darat		
5	Pengembangan Terminal Tipe A Betan Subing	Menteri Perhubungan
6	Pengembangan Terminal Tipe A Purabaya	Menteri Perhubungan
7	<i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Terminal Tipe A Poris Plawad	Menteri Perhubungan
Konektivitas Jalan		
8	Jalan Tol Demak-Tuban	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9	Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10	Jalan Tol Dalam Kota Bandung	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11	Jalan Tol Samarinda-Bontang	Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan ...

		Perumahan Rakyat
12	Jalan Tol Cibadak-Pelabuhan Ratu	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13	Jalan Tol Bandara Supadio-Pelabuhan Kijing	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14	Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Kota Surakarta	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman		
15	Sistem Penyediaan Air Minum Regional Ir. H. Djuanda (Jatiluhur II)	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Bekasi, Bupati Bekasi, dan Bupati Bogor
16	Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatigede	Gubernur Jawa Barat
17	Sistem Penyediaan Air Minum Regional Sinumbra	Gubernur Jawa Barat
18	Pengembangan TPAS Piyungan	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan		
19	Sistem Penyediaan Air Minum Lau Biang/Lau Dah	Bupati Karo
20	Sistem Penyediaan Air Minum Kota Denpasar	Walikota Denpasar
21	TPAS Manggar	Walikota Balikpapan
Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan		
22	Rumah Susun Karawang Spuur	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Waduk <i>Multipurpose</i> dan Modernisasi Irigasi		
23	Bendungan Leuwikeris: Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 20 MW	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan		
24	Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Kota Batam	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
25	Pembangunan Jaringan Distribusi Gas	Menteri Energi dan Sumber Daya

	Bumi untuk Rumah Tangga Kota Palembang	Mineral
Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan		
26	Alat Penerangan Jalan Kabupaten Ngawi	Bupati Ngawi
27	Alat Penerangan Jalan Kabupaten Bandung	Bupati Bandung
28	Alat Penerangan Jalan Kabupaten Ponorogo	Bupati Ponorogo
Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga		
29	Revitalisasi Pasar Induk Gadarata Singasana Tabanan	Bupati Tabanan
Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi		
30	Pengelolaan dan Pembangunan Armada Kapal Riset Nasional	Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
31	Kawasan <i>Sport Centre</i> Kota Serang	Gubernur Banten
Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan		
32	Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	Walikota Samarinda
33	Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad Zyn	Bupati Sampang
34	Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	Walikota Denpasar
Peningkatan Akses terhadap Keadilan		
35	Pembangunan Lembaga Pemasarakatan di Nusa Tenggara Barat	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
36	Lembaga Pemasarakatan dan Pengembangan Kawasan Agroindustri di Lahan Milik Lapas Bojonegoro	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SIAP DITAWARKAN

I. Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan untuk Tahap Transaksi

Nomor	Nama Proyek	Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
Konektivitas Udara		
1	Pembangunan Bandar Udara Singkawang	Menteri Perhubungan
Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan		
2	Revitalisasi dan Pembangunan Alat Penerangan Jalan Kota Denpasar	Walikota Denpasar

II. Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Tahap Transaksi

Nomor	Nama Proyek	Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
Konektivitas Jalan		
1	Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	<i>Flyover</i> Sitinjau Lauik	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung)	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Jalan Tol Kediri-Tulungagung	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6	Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7	Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Waduk <i>Multipurpose</i> dan Modernisasi Irigasi		
8	Bendungan Bintang Bano: Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9	Bendungan Tiga Dihaji: Pembangkit Listrik Tenaga Air	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman		
10	TPPAS Regional Legok Nangka	Gubernur Jawa Barat

Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan		
11	Rumah Sakit Universitas Padjadjaran	Rektor Universitas Padjadjaran

DAFTAR RENCANA
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA
TAHUN 2024

PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI IBU KOTA
NUSANTARA DALAM PROSES PENYIAPAN

Nomor	Nama Proyek	Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
1	Jalan Tol Akses IKN	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Hunian Prakarsa PT Nindya Karya	Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
3	Hunian Prakarsa PT Intiland Development	Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
4	Hunian Prakarsa PT Trinita-Truba	Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
5	Hunian Prakarsa IJM Corporation	Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
6	Hunian Prakarsa Maxim Global Berhad	Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
7	Hunian Prakarsa Ciputra	Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
8	Hunian Prakarsa Konsorsium Nusantara	Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

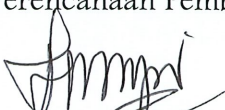
PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI IBU KOTA
NUSANTARA SIAP DITAWARKAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,


Teni Widuriyanti